BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya pemerintah untuk mencapai tujuan negara adalah dengan menciptakan kesejahteraan seluruh lapisan rakyat salah satunya dengan perbaikan infrastruktur perekonomian. Indikasi keberhasilan pembangunan infrastruktur tersebut adalah infrastruktur yang telah dibangun dapat diterima dan dimanfaatkan oleh warga masyarakat.

Salah satu infrastruktur yang penting bagi perekonomian warga desa adalah irigasi, yang penting bagi keberlanjutan pertanian, termasuk kedaulatan pangan. Bagi pembangunan wilayah perdesaan, ketersediaan air yang cukup untuk mendukung usaha pertanian sangat penting, karena pertanian merupakan sumber penghidupan penting komunitas perdesaan. Walaupun Indonesia terletak di daerah beriklim tropis basah yang memiliki curah hujan yang tinggi, pada musim kemarau suplai air untuk usaha pertanian diperlukan. Selain itu, terbatasnya jumlah air yang dapat dimanfaatkan untuk proses produksi terjadi bukan hanya pada musim kemarau namun juga pada musim hujan dikarenakan air hujan yang jatuh dibiarkan sebagai air limpasan atau aliran permukaan. Peningkatan kebutuhan terhadap sumber daya air untuk usaha pertanian semakin tinggi tidak sebanding dengan ketersediaan air yang bisa dimanfaatkan sehingga menyebabkan berkurangnya produksi, jenis, dan luas tanam tanaman pangan.

Oleh sebab itu, perbaikan dan pengembangan infrastruktur irigasi merupakan faktor penentu untuk mendukung proses produksi, selain dari peningkatan jaringan pemasaran produk tanaman pangan. Jaringan irigasi diperlukan untuk mengalirkan air sampai ke areal persawahan dan air irigasi diperlukan untuk mengairi persawahan pada saat musim tanam. Menurut Mawardi dan Memed (2004), irigasi merupakan upaya mengambil air dan memanfaatkan untuk kebutuhan usaha pertanian dengan cara mengalirkan dan membagikan air secara teratur dalam usaha pemenuhan kebutuhan air pada areal pertanian tanaman pangan. Keterbatasan infrastruktur pembangunan jaringan irigasi dapat mengakibatkan tingginya kerusakan terhadap produk pertanian, tingginya tingkat kehilangan hasil dalam proses produksi dan pengolahan pasca panen sehingga

berpengaruh pada kemampuan dan penyediaan pangan pada suatu daerah (Kementan 2016).

Karena pentingnya irigasi bagi pembangunan perdesaan, kebijakan pemerintah untuk mendukung pembangunan dan pengelolaan sistem irigasi yang teratur pada tingkat usaha tani diperlukan. Kebijakan perlu diorientasikan terhadap “pengelolaan sistem irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air”, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tingkat tersier merupakan tanggungjawab pokok kelompok tani pemakai air atau perkumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dalam lembaga petani pemakai air (P3A).

Menurut Undang - Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2006 tentang irigasi, untuk memecahkan persoalan kedaulatan pangan daerah, pemerintah pusat menyerahkan wewenang urusan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan kepada kabupaten/kota seperti yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014. Untuk urusan pangan, penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah diikuti dengan penyerahan atau transfer keuangan seperti kebijakan pemerintah untuk peningkatan kedaulatan pangan serta ketahanan pangan melalui program Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pertanian dan kegiatan pembangunan irigasi tersier.

Menurut situs online www.depkeu.djpk.go.id tujuan pengalokasian DAK bidang pertanian dan kegiatan pembangunan irigasi tersier adalah sebagai berikut : 1) Melaksanakan kegiatan khusus di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, serta infrastruktur sehingga dapat memacu peningkatan produksi perluasan lapangan kerja dan menciptakan aktifitas ekonomi terutama di pedesaan; 2) Melaksanakan kegiatan khusus di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sehingga dapat meningkatkan pelayanan dasar dan prasarana dasar bagi penduduk miskin; 3) Melaksanakan kegiatan khusus di bidang infrastruktur sehingga dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup, serta mencegah kerusakan atau menyebabkan pencemaran, mendorong ketersediaan fasilitas umum untuk kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

Untuk merealisasikan DAK, pemerintah pusat mengharuskan pemerintah daerah untuk menyediakan dana pendamping guna mewujudkan ketahanan pangan yang merupakan konsekuensi otonomi daerah penanganan ketahanan pangan.

Penyertaan dana pendamping dan penunjang merupakan aktualisasi pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan yang prioritas nasional dan telah menjadi kewenangan daerah. Pemanfaatan yang spesifik dana alokasi khusus untuk membiayai pelayanan dan urusan yang mejadi tujuan nasional ,yaitu bidang pertanian mewajibkan daerah menyediakan pendamping dan penunjang dari sumber lain misalnya APBD.

Berpedoman pada undang-undang nomor 7 Tahun 2004 mengenai sumber daya air, pemerintah pusat dan daerah bersama-sama menyediakan anggaran untuk melakukan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi tingkat primer, sekunder dan tersier sekaligus juga anggaran untuk operasi dan pemeliharaan masing – masing tingkatan jaringan irigasi. Untuk membantu pemerintah daerah menangani irigasi dengan debit air < 1000 pemerintah pusat mengalokasikan dana alokasi khusus tujuan pemerintah pusat untuk memampukan pemerintah daerah meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian dalam mendukung kedaulatan pangan nasional. Sedangkan untuk pelaksanaan konstruksi irigasi tersier menjadi tanggung jawab petani dan dapat dibantu pemerintah dan pemerintah daerah.

Salah satu kabupaten penerima DAK bidang pertanian adalah kabupaten Lima Puluh Kota. Dana Alokasi Khusus bidang pertanian untuk Kabupaten Lima Puluh Kota diberikan dari tahun 2011 sampai dengan 2016 yang tersebar di 13 kecamatan. Dari 13 kecamatan yang ada di kabupaten Lima Puluh Kota, Kecamatan Bukit Barisan lahan rawan kekeringan mencapai 50 – 100 ha, luasan ini nomer 2 setelah Kecamatan Payakumbuh, (Revisi RTRW Kab. Lima Puluh Kota 2010 – 2030). Pembangunan jaringan irigasi tersier yang didanai bersama oleh pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten 50 Kota dilaksanakan oleh kelompok-kelompok tani Nagari Maek. Dengan model kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kelompok-kelompok tani, jaringan irigasi baru di Nagari Maek berhasil dibangun, Penelitian ini fokus pada Analisis keterlibatan kelompok tani dalam pembangunan jaringan irigasi dengan memberikan perhatian terhadap pemberdayaan bagi kelompok tani sehingga berhasil membangun jaringan irigasi tersier melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian di Nagari Maek.

B. Masalah Penelitian

1. Apakah dampak irigasi tersier terhadap usaha tanaman pangan di Nagari Maek ?
2. Bagaimana kelompok - kelompok tani secara bersama-sama membangun jaringan irigasi tersier DAK bidang pertanian di Nagari Maek ?
3. Bagaimanakah pemberdayaan terhadap kelompok tani yang dilakukan oleh pemerintah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dampak irigasi tersier terhadap usaha tanaman pangan di nagari Maek.
2. Untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan pembangunan irigasi tersier DAK bidang pertanian di nagari Maek.
3. Untuk menganalisis pemberdayaan terhadap kelompok tani yang dilakukan oleh pemerintah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota khususnya Dinas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan dalam pelaksanaan pembangunan irigasi tersier yang dilakukan melalui swakelola kelompok tani dapat meningkatkan ketersediaan air terus menerus sepanjang musim guna mendukung usaha tanaman pangan.
2. Pemerintah nagari Maek dan kelompok tani beserta masyarakat lebih berperan aktif dalam pembangunan dan mendorong peningkatan kemampuan kelembagaan yang ada.
3. Secara akademis, diharapkan penelitian ini memberikan tambahan ilmu pengetahuan tentang pembangunan irigasi tersier secara partisipatif yang merupakan perwujudan dari desentralisasi dan otonomi daerah serta memperkaya konsep atau teori dalam ilmu pembangunan wilayah terutama pada perencanaan pembangunan partisipatif